Jurnal Pendidikan Agama Islam
Vol. 06, No. 02, (2026)
E-ISSN: 2808-8581 https://ejurnal.iaigh.ac.id/index.php/at-tadib/index

Disintermediasi Otoritas Ulama dan Reposisi Guru Pendidikan Agama Islam di Era Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Ta'dib

M. Maswadi[1], Mahfud Junaedi[2], Muhammad Habiburrahman[3]
[1,2,] Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, [3]Institut Agama Islam Qomarul Huda, Lombok Tengah, Indonesia
Email Koserpondensi: sawinggoal@gmail.com

Dikirim: 01 Oktober 2026	Revisi: 10 Oktober 2026	Diterima: 19 Oktober 2026
Korespondensi Phone: +62 819-1723-6777		

Abstrak: Kecerdasan buatan generatif memungkinkan akses terhadap jawaban keagamaan tanpa perantaraan ulama atau guru agama. Artikel ini menganalisis disintermediasi otoritas ulama, implikasinya bagi guru Pendidikan Agama Islam, dan reposisi peran guru melalui konsep ta'dib dalam filsafat pendidikan Islam. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis kritis terhadap literatur pendidikan Islam, otoritas keagamaan digital, dan kecerdasan buatan. Analisis menunjukkan bahwa penggantian guru oleh kecerdasan buatan mengandung persoalan kategori: kemampuan menyampaikan informasi pada wilayah ta'lim tidak identik dengan fungsi pendidikan sebagai penanaman adab. Dalam kerangka ta'dib, pendidikan memerlukan keteladanan, tanggung jawab moral, dan relasi personal antara guru dan peserta didik. Karena itu, disintermediasi digital menuntut penguatan peran guru sebagai verifikator epistemik sekaligus pelaku ta'dib. Kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai alat bantu pencarian informasi, sedangkan guru membimbing pemeriksaan sumber, penalaran keagamaan, dan pembentukan adab. Artikel ini menawarkan kerangka reposisi konseptual yang memerlukan pengujian empiris dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
Kata kunci: ta'dib; filsafat pendidikan Islam; otoritas ulama; guru pendidikan agama Islam; kecerdasan buatan

Abstract: Generative artificial intelligence enables access to religious answers without mediation by religious scholars or teachers. This article examines the disintermediation of scholarly authority, its implications for Islamic Religious Education teachers, and the repositioning of teachers through the concept of ta'dib in Islamic educational philosophy. The study employs library research and critical analysis of literature on Islamic education, digital religious authority, and artificial intelligence. The analysis identifies a category problem in claims that artificial intelligence can replace teachers: the capacity to convey information within ta'lim is not equivalent to education as the cultivation of adab. Within the ta'dib framework, education requires exemplary conduct, moral responsibility, and personal teacher–student relationships. Digital disintermediation therefore calls for strengthening teachers' roles as epistemic verifiers and practitioners of ta'dib. Artificial intelligence can support information seeking, while teachers guide source verification, religious reasoning, and the cultivation of adab. The article proposes a conceptual framework for repositioning teachers that requires empirical examination in Islamic Religious Education classrooms.
Keywords: ta'dib; Islamic educational philosophy; scholarly authority; Islamic Religious Education teachers; artificial intelligence

Pendahuluan

Cara umat Islam mencari jawaban atas persoalan keagamaan telah berubah secara mendasar. Jika sebelumnya seseorang yang menghadapi persoalan agama akan mendatangi ulama atau guru agama dan menunggu jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, kini ia cukup mengetikkan pertanyaan pada chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dan menerima jawaban secara cepat, tanpa interaksi dengan otoritas keagamaan mana pun (Usmonov, 2025). Dalam tradisi keilmuan Islam, otoritas semacam ini ditopang oleh konsep sanad, yaitu jaringan guru-murid yang berfungsi ganda sebagai jalur transmisi ilmu sekaligus mekanisme akuntabilitas. Kajian terbaru menunjukkan bahwa otoritas ulama tengah bertransformasi dari sistem berbasis sanad menuju bentuk legitimasi yang semakin bertumpu pada visibilitas dan keterlibatan pengguna di platform digital (Siregar, Zhakypkazy, & Uyuni, 2025).

Pergeseran tersebut juga berkaitan dengan perubahan pembelajaran agama di media sosial. Solahudin dan Fakhruroji (2020) menelaah hubungan antara praktik belajar Islam, populisme keagamaan, dan otoritas di Indonesia. Zaid, Fedtke, Shin, El Kadoussi, dan Ibahrine (2022) menunjukkan bahwa pemengaruh media sosial turut membentuk ulang otoritas keagamaan di kawasan Teluk. Kedua kajian ini memberi konteks perubahan mediasi agama, meskipun tidak secara langsung menguji penggunaan kecerdasan buatan di kelas Pendidikan Agama Islam.

Fenomena disintermediasi ini umumnya dikaji pada skala masyarakat, yaitu bagaimana ulama dan lembaga fatwa kehilangan posisi sebagai perantara tunggal. Namun, logika yang sama berlaku pada skala yang lebih kecil dan lebih dekat dengan keseharian peserta didik: ruang kelas. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi yang analog dengan ulama dalam kerangka sanad: ia adalah simpul otoritas lokal tempat peserta didik semestinya bertanya dan memverifikasi pemahaman keagamaannya. Ketika peserta didik dapat memperoleh jawaban instan dari chatbot tanpa melalui gurunya, disintermediasi yang sama yang mengancam ulama di ranah publik juga berlangsung di ruang kelas, hanya dalam skala yang lebih mikro dan belum banyak diperbincangkan.

Namun, memahami ancaman ini semata sebagai persoalan kecepatan atau akurasi jawaban berisiko mereduksi persoalan yang jauh lebih mendasar. Filsafat pendidikan Islam, sebagaimana dirumuskan Al-Attas (1980), membedakan pendidikan (ta'dib) dari sekadar pengajaran (ta'lim): tujuan pendidikan Islam bukan semata transfer informasi yang benar, melainkan penanaman adab merupakan penempatan segala sesuatu pada kedudukannya yang

tepat, termasuk penempatan diri manusia di hadapan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Kerangka epistemologi Islam turut membedakan ilmu yang diperoleh secara diskursif (kasbi) dari pengetahuan yang matang menjadi hikmah lewat proses pembimbingan dan penghayatan bersama guru (Kartanegara, 2005). Dengan kerangka ini, artikel ini hendak menjawab pertanyaan yang lebih mendasar dari sekadar "siapa yang menjawab lebih cepat": apakah fungsi guru PAI sebagai pelaku ta'dib dapat digantikan oleh sistem yang beroperasi murni pada wilayah ta'lim?

Sejumlah kajian telah membahas AI dan fatwa keagamaan, sebagian besar berfokus pada kebolehan fikih dan tata kelola kelembagaan (Usmonov, 2025), namun jarang yang menempatkan persoalan ini dalam kerangka filsafat pendidikan Islam maupun implikasinya secara spesifik bagi guru PAI. Kekosongan inilah yang hendak diisi artikel ini, melalui tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana filsafat pendidikan Islam, melalui konsep ta'dib, menjelaskan batas kemampuan AI dalam menggantikan fungsi guru PAI; kedua, bagaimana disintermediasi otoritas ulama oleh AI berimplikasi pada posisi guru PAI sebagai otoritas lokal di ruang kelas; ketiga, bagaimana peran guru PAI dapat direposisi agar tetap menjalankan fungsi ta'dib yang tidak tergantikan oleh AI.

Metode

Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis kritis. Kerangka teoretis utamanya adalah konsep ta'dib (Al-Attas, 1980) dan epistemologi Islam (Kartanegara, 2005). Bahan kajian meliputi karya filosofis serta artikel jurnal tentang otoritas keagamaan digital, pendidikan Islam, dan kecerdasan buatan. Karya filosofis digunakan untuk merumuskan kategori pendidikan dan kedudukan guru, sedangkan kajian kontemporer digunakan untuk membaca perubahan mediasi pengetahuan keagamaan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: merumuskan fondasi filosofis otoritas guru melalui konsep ta'dib; menelaah secara analogis implikasi disintermediasi ulama terhadap posisi guru Pendidikan Agama Islam; dan menyusun kerangka reposisi guru sebagai pelaku ta'dib sekaligus verifikator epistemik. Temuan artikel bersifat konseptual dan argumentatif, bukan hasil pengukuran perilaku peserta didik atau pengujian langsung terhadap sistem kecerdasan buatan.

Hasil dan Pembahasan

1. Ta'dib: Fondasi Filosofis Otoritas Guru dalam Pendidikan Islam

Al-Attas (1980) menegaskan bahwa istilah paling tepat untuk pendidikan Islam bukanlah tarbiyah (pengasuhan/pertumbuhan) atau ta'lim (pengajaran/transfer informasi),

melainkan ta'dib, yaitu proses penanaman adab pada diri manusia. Adab, dalam pengertian ini, bukan sekadar sopan santun, melainkan pengenalan dan pengakuan terhadap kedudukan segala sesuatu secara tepat dalam tatanan wujud, sehingga menuntun manusia pada pengakuan yang benar terhadap kedudukan Tuhan, dirinya sendiri, dan sesamanya. Tujuan pendidikan Islam, dengan demikian, bukan sekadar menghasilkan individu yang mengetahui jawaban yang benar, melainkan individu yang beradab.

Ahmed (2018) menempatkan pemikiran ta'dib Al-Attas dalam pembahasan filsafat pendidikan yang berakar pada tradisi Muslim. Kosim, Kustati, dan Murkilim (2020) mengkaji relevansi pemikiran Al-Attas bagi pendidikan Islam di Indonesia. Keduanya memperluas dasar pembacaan filosofis artikel ini: teknologi pembelajaran perlu dinilai melalui tujuan pendidikan dan pandangan tentang ilmu, bukan hanya melalui efisiensi penyampaian materi.

Implikasi konsep ini bagi otoritas guru sangat mendasar. Guru dalam pendidikan Islam bukan sekadar penyalur informasi yang benar (fungsi ta'lim), melainkan uswah hasanah, yaitu teladan hidup yang adab dan ilmunya ditransmisikan melalui relasi personal, bukan semata melalui isi pesan yang disampaikan. Otoritas guru, karenanya, melekat pada keberadaan (being) sang guru sebagai pribadi yang menjalani dan memodelkan adab, bukan semata pada kebenaran proposisional dari apa yang ia katakan. Kartanegara (2005) menambahkan dimensi epistemologis: ilmu yang diperoleh secara diskursif (kasbi/eksternal) berbeda dari hikmah yang matang lewat proses penghayatan dan bimbingan bertahap bersama guru. Sanad, dalam pengertian ini, bukan sekadar rantai verifikasi kebenaran informasi, melainkan rantai transmisi adab dan hikmah dari pribadi ke pribadi.

Dari fondasi filosofis ini dapat dirumuskan sebuah proposisi kunci: fungsi ta'dib pada hakikatnya tidak dapat direduksi menjadi pertukaran informasi, betapa pun akuratnya informasi tersebut, karena ta'dib menuntut keberadaan pribadi yang hidup, berniat (niyyah), dan dapat dijadikan teladan.

2. Sanad, Disintermediasi, dan Guru sebagai Otoritas Lokal

Sanad menempatkan guru sebagai simpul ganda: simpul transmisi ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus simpul transmisi adab yang hidup dan dapat diteladani. Dalam tradisi pesantren maupun sekolah, posisi ini diwarisi oleh guru PAI: ia bukan sekadar penyampai materi, melainkan rujukan yang otoritasnya diakui karena jalur keilmuan, kredibilitas, dan keteladanan pribadinya. Disintermediasi digital mengubah relasi ini pada dimensi ta'lim-nya: ketika arus informasi keagamaan berpindah ke ruang digital, siapa pun dapat mengakses jawaban keagamaan hanya dengan beberapa ketukan tombol, tanpa perlu

melalui otoritas yang mengujinya (Solahudin & Fakhruroji, 2020). AI generatif mempertajam pergeseran ini karena tidak sekadar menyediakan akses, tetapi memproses dan menyintesis jawaban secara otomatis dan instan, termasuk bagi peserta didik yang sebelumnya akan bertanya kepada gurunya.

Namun, perubahan media tidak selalu menghapus otoritas guru atau kiai. Mustofa, Mas'ud, dan Elizabeth (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran pesantren dapat beradaptasi melalui pola hibrida dan kegiatan mengaji daring. Hal ini membatasi klaim disintermediasi: yang berubah adalah cara otoritas dimediasi, sedangkan keberlanjutan peran pendidik bergantung pada praktik pembelajaran dan pertanggungjawaban keilmuan.

Persoalan tata kelola menjadi penting karena aplikasi kecerdasan buatan keagamaan dapat menghasilkan jawaban dengan orientasi dan kedalaman rujukan yang berbeda. Marwantika dan Dauda (2025) menunjukkan keterbatasan transparansi sumber serta potensi bias pada aplikasi yang mereka kaji. Temuan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan satu sikap yang seragam dari seluruh organisasi Islam, tetapi mendukung kebutuhan pemeriksaan sumber dan pengawasan keilmuan. Bagi guru Pendidikan Agama Islam, kebutuhan ini memperkuat peran pembimbing dalam memisahkan kemudahan akses informasi dari validitas pengetahuan keagamaan.

3. AI, Ta'lim, dan Batas Filosofis Ketidaktergantian Guru

AI generatif menjawab pertanyaan keagamaan bukan melalui ijtihad, niat, atau penghayatan, melainkan melalui deteksi pola statistik atas korpus teks keagamaan (Usmonov, 2025). Dalam kerangka ta'dib, ini berarti AI secara struktural hanya beroperasi pada wilayah ta'lim: ia dapat menyusun kalimat yang secara proposisional benar atau tampak koheren, tetapi tidak memiliki niyyah, tidak menjalani proses penghayatan menuju hikmah, dan tidak dapat menjadi uswah hasanah yang hidup. Betapa pun canggih kemampuan sintaksis dan semantiknya, AI tidak menempati posisi ontologis yang dituntut oleh ta'dib: ia bukan pribadi yang beradab, melainkan sistem yang memproses pola.

Risiko yang muncul di ruang kelas karenanya bukan soal "AI versus guru dalam hal siapa yang lebih akurat", melainkan risiko kekeliruan kategori pada peserta didik: ketika jawaban chatbot yang instan dan tampak meyakinkan dianggap setara atau bahkan menggantikan bimbingan guru, peserta didik berisiko mereduksi pendidikan agama menjadi sekadar pertukaran informasi (ta'lim) dan kehilangan pengalaman ta'dib yang semestinya menjadi inti pendidikan Islam. Wibawa guru yang tergeser, dengan demikian, bukanlah kekalahan guru dalam kompetisi informasi, melainkan gejala tergesernya pemahaman peserta

didik dan mungkin juga institusi pendidikan itu sendiri, tentang apa yang sesungguhnya menjadi tujuan pendidikan agama.

4. Reposisi Guru PAI: dari Penyampai Informasi Menjadi Pelaku Ta'dib dan Verifikator Epistemik

Risiko tergantikannya guru sesungguhnya dapat dibalik menjadi peluang penguatan peran, asalkan fungsi guru direposisi secara eksplisit dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama, dimensi epistemik: guru PAI berperan sebagai verifikator dan pembimbing penalaran, pihak yang membantu peserta didik menelaah, membandingkan, dan menimbang jawaban algoritmik dengan kerangka keilmuan yang sahih. Kedua, dan lebih fundamental, dimensi ta'dib: guru PAI berperan sebagai uswah hasanah yang menghidupkan adab dalam relasi personal dengan peserta didik, sesuatu yang tidak dapat dipindahkan ke sistem AI betapa pun canggihnya.

Reposisi ini dapat dijalankan melalui alur sederhana: AI diposisikan sebagai wasilah pada wilayah ta'lim, yaitu titik awal peserta didik mencari informasi, mempelajari konsep dasar, atau merumuskan pertanyaan (Usmonov, 2025); sementara guru PAI berperan pada wilayah ta'dib dan verifikasi, membimbing peserta didik menelusuri rujukan ulama atau mazhab di balik jawaban tersebut sekaligus menghayati maknanya, sebelum menjadikannya pegangan. Untuk persoalan yang serius atau mengikat secara hukum agama, guru dapat mengarahkan peserta didik pada ulama bersanad atau lembaga fatwa resmi sebagai rujukan akhir.

Reposisi ini menuntut dua kompetensi baru bagi guru PAI: literasi digital-epistemologis, yaitu kemampuan mengenali cara kerja AI dalam menghasilkan jawaban keagamaan berikut keterbatasannya (Siregar et al., 2025); dan kesadaran ta'dib, yaitu kesadaran bahwa perannya tidak akan pernah tereduksi menjadi sekadar sumber informasi yang bersaing dengan chatbot, melainkan tetap menjadi pribadi yang menghidupkan adab bagi peserta didiknya.

Kesimpulan

Disintermediasi otoritas ulama oleh AI generatif tidak hanya berlangsung pada skala masyarakat, tetapi berlaku secara analog pada skala ruang kelas, mengancam wibawa guru PAI sebagai otoritas keagamaan lokal. Namun, filsafat pendidikan Islam, khususnya konsep ta'dib, menunjukkan bahwa ancaman ini pada hakikatnya adalah persoalan kategori, bukan kompetisi kecepatan atau akurasi: AI hanya beroperasi pada wilayah ta'lim, sedangkan pendidikan Islam berorientasi pada ta'dib yang menuntut keberadaan pribadi hidup, berniat, dan dapat diteladani.

Atas dasar itu, respons yang tepat bukan menolak kehadiran AI, melainkan mereposisi peran guru PAI secara eksplisit dalam dua dimensi: verifikator epistemik dan pelaku ta'dib, dengan AI diposisikan sebagai alat bantu pada wilayah ta'lim semata. Penelitian lanjutan secara empiris diperlukan untuk menguji bagaimana reposisi berbasis ta'dib ini dapat diimplementasikan dalam praktik pembelajaran PAI sehari-hari.

Daftar Pustaka

Ahmed, F. (2018). An exploration of Naquib al-Attas' theory of Islamic education as ta'dīb as an 'indigenous' educational philosophy. *Educational Philosophy and Theory, 50*(8), 786–794. doi:10.1080/00131857.2016.1247685

Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur, Malaysia: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).

Kartanegara, M. (2005). *Menyibak tirai kejahilan: Pengantar epistemologi Islam*. Bandung, Indonesia: Mizan.

Kosim, M., Kustati, M., & Murkilim. (2020). Syed Muhammad Naquib al-Attas' ideas on the Islamization of knowledge and its relevance with Islamic education in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 44*(2). doi:10.30821/miqot.v44i2.724

Marwantika, A. I., & Dauda, K. O. (2025). Da'wah in the algorithmic era: Investigating bias and validity of Islamic artificial intelligence applications. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial, 8*(2), 1–19. doi:10.37680/muharrik.v8i2.7730

Mustofa, M. Y., Mas'ud, A., & Elizabeth, M. Z. (2023). Hybrid pesantren in Indonesia: Analyzing the transformation of Islamic religious education in the digital age. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 14*(1), 79–104. doi:10.24042/atjpi.v14i1.16928

Siregar, K. T., Zhakypkazy, I., & Uyuni, B. (2025). Indonesian muballigh and religious authority: From sanad to algorithmic transformation of Islamic knowledge transmission in the digital era. *Jurnal Indo-Islamika, 15*(2), 298–314. doi:10.15408/jii.v15i2.47052

Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2020). Internet and Islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions, 11*(1), 19. doi:10.3390/rel11010019

Usmonov, M. (2025). From human scholars to AI fatwas: Media, ethics, and the limits of AI in Islamic religious communication. *Al-i'lam: Journal of Contemporary Islamic Communication and Media, 5*(1). doi:10.33102/jcicom.vol5no1.125

Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., El Kadoussi, A., & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim millennials: How social media influencers reimagine religious authority and Islamic practices. *Religions, 13*(4), 335. doi:10.3390/rel13040335